

Laporan Ringkas

Konferensi Refleksi Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) di Indonesia 2025

Tomohon, Sulawesi Utara, 1-4 September 2025

Sekber Koalisi Advokasi KBB Indonesia
PUSAD Paramadina

Pendahuluan

Konferensi Refleksi Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) Indonesia 2025 berlangsung pada 1–4 September 2025 di Panti Samadi, Tomohon, Sulawesi Utara. Acara ini mengusung tema “Mempertahankan Rumah Demokrasi Kita: Konsolidasi Jaringan KBB dan Perluasan Arena Perjuangan” dan dihadiri 53 peserta dari berbagai daerah di Indonesia dan 31 orang/lembaga dari pelbagai wilayah di Sulawesi Utara (lihat lampiran 1). Mereka terdiri dari aktivis organisasi masyarakat sipil, akademisi perguruan tinggi, dan perwakilan komunitas agama dan kepercayaan.

Konferensi ini diselenggarakan Sekretariat Bersama Koalisi Advokasi KBB Indonesia (Sekber Koalisi KBB), yang kini dijalankan PUSAD Paramadina, bekerja sama dengan Koalisi Advokasi KBB Sulawesi Utara sebagai *makawale* (tuan rumah). Tujuan utama kegiatan ini adalah menyediakan forum tahunan bagi para pegiat KBB untuk merefleksikan capaian dan tantangan advokasi setahun terakhir, sekaligus menemukan terobosan baru dalam memperkuat kontribusi KBB bagi demokrasi Indonesia.

Konferensi 2025 melanjutkan jejak konferensi-konferensi sebelumnya. Pada 2023, konferensi di Puncak, Jawa Barat, menghasilkan rumusan empat pilar kerja, enam kelompok kerja tematik, serta mandat kepada PUSAD Paramadina untuk mengelola Sekretariat Bersama Koalisi KBB. Sementara itu, konferensi 2024 di tempat yang sama memperlihatkan pertumbuhan signifikan anggota, dengan meningkatnya jumlah peserta menjadi sekitar 170 orang, menekankan kaderisasi anak muda, dan memperkuat program-program Sekber melalui sekolah advokasi, publikasi, serta forum rutin. Dengan fondasi tersebut, konferensi 2025 hadir untuk memperdalam konsolidasi internal sekaligus memperluas arena perjuangan KBB agar lebih terhubung dengan isu demokrasi dan hak asasi manusia yang lebih luas.

Susunan Acara

Rangkaian acara konferensi disusun secara partisipatif (lengkapannya lihat lampiran 2). Hari pertama diawali dengan presentasi asesmen lembaga anggota yang menampilkan keragaman pendekatan advokasi dan kapasitas masing-masing. Hari kedua berfokus pada refleksi situasi demokrasi dan pembahasan tantangan internal maupun eksternal Koalisi KBB. Hari ketiga mendalami interseksionalitas KBB dengan isu-isu seperti gender, disabilitas, kemiskinan struktural, hak-hak sipil, dan lingkungan, kemudian dilanjutkan dengan diskusi strategi advokasi melalui studi kasus advokasi hukum, basis komunitas, kampanye digital, dan

pendidikan publik. Hari terakhir ditutup dengan evaluasi kolektif, refleksi bersama, serta ekskursi ke komunitas di Manado dan Minahasa Utara.

Hasil Utama

Konferensi 2025 menghasilkan sejumlah pembahasan penting mengenai situasi internal dan eksternal gerakan KBB. Dari sisi internal, peserta menyoroti perlunya memperjelas peran Sekretariat Bersama agar berfungsi sebagai penghubung, bukan sebagai lembaga payung baru. Tantangan regenerasi juga mencuat, mengingat sebagian aktivis lama mulai kelelahan sementara keterlibatan generasi muda dan kelompok disabilitas masih terbatas. Di samping itu, para peserta mengusulkan optimalisasi platform digital, khususnya website kbb.id dan media sosial, agar menjadi ruang berbagi pengetahuan dan memperkuat representasi anggota daerah.

Dari sisi eksternal, konferensi menegaskan bahwa advokasi KBB tidak dapat dipisahkan dari tantangan demokrasi yang lebih luas. Para peserta menyoroti pola pembatasan negara terhadap minoritas yang dilakukan lewat regulasi maupun kriminalisasi, serta menguatnya konservatisme sosial yang sering menutup ruang dialog. Karena itu, dibutuhkan strategi advokasi yang lebih kreatif, dengan bahasa publik yang membumi, pendekatan budaya seperti festival atau olahraga, serta penguatan aliansi lintas isu dengan kelompok masyarakat sipil lain. Isu lingkungan, hak masyarakat adat, gender, disabilitas, dan hak-hak sipil diidentifikasi sebagai pintu masuk yang strategis untuk memperluas relevansi advokasi KBB.

Sebagai keluaran langsung konferensi, peserta menyepakati “Maklumat Minahasa untuk Demokrasi Kita” (lampiran 3). Maklumat ini menegaskan solidaritas penuh terhadap gerakan rakyat yang menjadi korban represi negara, seraya mengecam praktik otoritarianisme yang dijalankan pemerintah. Peserta juga menyerukan perlunya membangun kekuatan politik rakyat yang partisipatif dan mendorong para pemuka agama dan organisasi keagamaan untuk berpihak secara terang-terangan kepada rakyat, bukan mendukung kesewenang-wenangan. Dengan demikian, maklumat ini bukan hanya sebuah pernyataan sikap, melainkan juga pedoman moral dan politik bagi Koalisi KBB dalam menghadapi situasi demokrasi ke depan.

Selain itu, konferensi menegaskan tindak lanjut kelembagaan melalui pembentukan sejumlah kelompok kerja (pokja) tematik yang akan dikoordinasi oleh Sekber KBB (lampiran 4). Pokja ini dirancang sebagai platform kolaboratif bagi anggota Koalisi untuk memperkuat advokasi sesuai bidang masing-masing. Beberapa pokja yang akan diaktivasi antara lain: kolaborasi lintas iman untuk keadilan lingkungan; penguatan protokol penanganan kasus-kasus darurat pelanggaran KBB; solidaritas antar-kelompok minoritas agama dan kepercayaan; peliputan dinamika KBB untuk memperkaya informasi publik; penguatan aturan dan praktik pembangunan rumah ibadat; serta pendidikan KBB baik formal maupun informal. Sekber KBB akan memfasilitasi dan memantau dinamika pokja-pokja ini, sementara koordinasi sehari-hari akan dijalankan secara mandiri oleh anggota yang tergabung di dalamnya.

Jalannya Konferensi

Hari Pertama, Senin, 1 September 2025

Konferensi dimulai dengan registrasi dan sambutan informal yang memungkinkan peserta berinteraksi sebelum acara resmi dibuka. Pada malam hari, setelah makan malam bersama, sesi

pembukaan dilaksanakan dengan suasana interaktif. Para peserta diperkenalkan satu sama lain dan diajak membagikan harapan serta kekhawatiran mereka terhadap konferensi. Acara kemudian dilanjutkan dengan presentasi asesmen lembaga anggota Koalisi KBB. Melalui visualisasi data interaktif, peserta memperoleh gambaran menyeluruh tentang profil lembaga, pendekatan advokasi yang digunakan, wilayah kerja, serta tantangan dan kapasitas masing-masing. Sesi ini menghasilkan notula visual dalam bentuk infografik yang berfungsi sebagai bahan evaluasi advokasi satu tahun terakhir sekaligus dasar untuk menyusun strategi bersama ke depan.

Hari Kedua, Selasa, 2 September 2025

Hari kedua dibuka dengan pleno bertema *KBB dan Demokrasi dalam Gelombang Otokrasi*. Para peserta menyoroti menguatnya politik kanan dan kemunduran demokrasi di Indonesia, serta bagaimana hal tersebut berdampak langsung pada kebebasan beragama atau berkeyakinan. Catatan penting yang muncul adalah kesadaran bahwa isu KBB tidak bisa dipisahkan dari persoalan demokrasi secara keseluruhan.

Setelah pleno, peserta membahas masalah internal Koalisi KBB, termasuk mekanisme pengambilan keputusan di Sekretariat Bersama, partisipasi anggota daerah yang masih terbatas, regenerasi kader, serta kebutuhan untuk mengoptimalkan media digital sebagai lumbung pengetahuan. Sesi berikutnya menyoroti tantangan eksternal, antara lain fragmentasi institusi negara, keterbatasan dukungan publik, dan konservatisme sosial yang menutup ruang dialog. Kedua sesi ini menghasilkan catatan strategis mengenai perbaikan tata kelola internal sekaligus arah advokasi eksternal yang lebih adaptif.

Sore harinya, pleno lanjutan mempertemukan hasil diskusi internal dan eksternal, sekaligus merumuskan langkah konsolidasi. Malam hari ditutup dengan pertemuan khusus bersama Koalisi Advokasi KBB Sulawesi Utara untuk berbagi pengalaman lokal dalam menangani kasus-kasus intoleransi dan diskriminasi di daerah.

Hari Ketiga, Rabu, 3 September 2025

Fokus hari ketiga adalah pada interseksionalitas KBB dengan isu-isu lain. Peserta terbagi dalam empat panel paralel yang membahas gender dan disabilitas, kemiskinan struktural, hak-hak sipil, serta lingkungan. Diskusi ini menegaskan bahwa diskriminasi berbasis agama atau keyakinan seringkali berlapis dengan bentuk-bentuk ketidakadilan lain. Misalnya, perempuan dan penyandang disabilitas menghadapi diskriminasi ganda, sementara pembangunan ekstraktif mengancam ruang hidup masyarakat adat yang juga terkait dengan tempat suci dan tradisi keagamaan mereka.

Panel berikutnya membahas strategi advokasi KBB dengan studi kasus beragam, seperti advokasi hukum, penguatan basis komunitas, kampanye digital, dan pendidikan publik. Peserta mengkritisi pendekatan yang ada, sekaligus merumuskan ide-ide baru untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan efektivitas advokasi.

Dalam pleno sore hari, seluruh hasil panel dipresentasikan dan dikaitkan dengan agenda penguatan kelembagaan Koalisi KBB. Salah satu keputusan penting yang muncul adalah rencana membentuk sejumlah kelompok kerja (pokja) tematik untuk memastikan keberlanjutan dan fokus advokasi setelah konferensi. Pokja yang disepakati mencakup: kolaborasi lintas iman

untuk keadilan lingkungan, penanganan cepat kasus-kasus darurat KBB, solidaritas antar-kelompok minoritas agama dan kepercayaan, peliputan dan dokumentasi dinamika KBB, advokasi aturan dan pembangunan rumah ibadat, serta pendidikan KBB baik di jalur formal maupun informal. Sekretariat Bersama akan berperan sebagai penghubung, sementara masing-masing pokja akan dikelola secara mandiri oleh anggota yang berkomitmen.

Hari ditutup dengan refleksi kolektif yang menekankan pentingnya kerja lintas isu, regenerasi kader muda, serta keberlanjutan kerja melalui pokja yang baru dirancang tersebut.

Hari Keempat, Kamis, 4 September 2025

Hari terakhir difokuskan pada kunjungan lapangan ke beberapa lokasi strategis di Sulawesi Utara untuk memperkaya pemahaman peserta tentang kondisi nyata komunitas minoritas dan kelompok rentan.

Kunjungan pertama adalah ke Sekretariat Himpunan Nelayan Tongkol di Manado Utara. Di sana peserta mendengar langsung dari nelayan tentang dampak reklamasi Pantai Manado Utara terhadap kehidupan mereka. Reklamasi ini mengancam mata pencaharian nelayan karena tangkapan ikan berkurang, akses ke laut terganggu, dan ekosistem laut rusak. Para nelayan juga mengeluhkan minimnya pelibatan mereka dalam proses perencanaan. Sebagai bentuk dukungan, peserta konferensi mengeluarkan pernyataan sikap menolak reklamasi; pernyataan ini direkam dan akan dibagikan melalui media sosial Sekber KBB dan anggota Koalisi.

Lokasi kedua adalah Rumah Misi Jemaah Ahmadiyah Manado, tepatnya Peace Center di Kelurahan Taas, Kecamatan Tikala. Tempat ini dibangun sebagai simbol perdamaian dan toleransi, menampilkan foto tokoh-tokoh lintas agama dan kutipan inspiratif tentang kemanusiaan dan persatuan. Kehadirannya menjadi ruang pertemuan antariman dan sumber inspirasi bagi komunitas sekitar.

Kunjungan ketiga adalah ke Arama Kebun Kesadaran di Minahasa Utara. Tempat ini menghadirkan filosofi 108 rupang Buddha yang dipadukan dengan taman meditasi dan kebun kesadaran spiritual. Lingkungan yang asri, patung-patung Buddha, dan ruang kontemplatif terbuka di sana dimaknai sebagai ajakan untuk membangun kesadaran damai, penghormatan terhadap alam, serta hubungan antar-manusia yang harmonis.

Pembelajaran dan Rekomendasi

Pembelajaran Utama

Dari rangkaian diskusi dan pleno konferensi, terdapat sejumlah pembelajaran penting bagi Koalisi Advokasi KBB Indonesia:

1. **Keterhubungan Isu KBB dengan Demokrasi:** Peserta menegaskan bahwa advokasi KBB tidak dapat berdiri sendiri, melainkan selalu terkait dengan situasi demokrasi secara keseluruhan. Kemunduran demokrasi dan menguatnya politik otoritarian secara langsung mempersempit ruang kebebasan beragama atau berkeyakinan.
2. **Pentingnya Konsolidasi Internal:** Perdebatan tentang peran Sekretariat Bersama menyoroti kebutuhan untuk memperjelas mekanisme pengambilan keputusan dan memperkuat

representasi anggota dari daerah. Regenerasi kader, khususnya melibatkan anak muda dan kelompok disabilitas, menjadi agenda mendesak agar gerakan tidak terjebak pada lingkaran aktivis lama.

3. Strategi Advokasi yang Adaptif dan Inklusif: Bahasa publik advokasi KBB dinilai masih elitis dan sulit dipahami masyarakat luas. Pembelajaran dari berbagai daerah menunjukkan bahwa pendekatan budaya, olahraga, maupun kegiatan bersama lintas iman lebih efektif membangun solidaritas di tingkat akar rumput.
4. Interseksionalitas sebagai Pintu Masuk Baru: KBB harus diposisikan dalam kaitan erat dengan isu-isu lain, seperti gender, disabilitas, hak-hak sipil, dan lingkungan. Advokasi yang bersifat lintas isu memungkinkan terbentuknya koalisi yang lebih luas dan relevan dengan realitas masyarakat.
5. Kolaborasi dengan Negara dan Masyarakat Sipil: Negara dipahami bukan sebagai entitas tunggal, melainkan terfragmentasi. Karena itu, strategi advokasi perlu disesuaikan dengan masing-masing unit institusi. Pada saat yang sama, kolaborasi lintas isu dengan kelompok masyarakat sipil lain terbukti membuka jalan untuk solidaritas yang lebih luas.
6. Kebutuhan Struktur Kerja yang Berkelanjutan: Diskusi konferensi menunjukkan perlunya wadah kerja yang lebih terfokus agar gagasan tidak berhenti sebagai wacana tahunan. Pembentukan kelompok kerja tematik dianggap sebagai langkah strategis untuk menyalurkan energi advokasi ke dalam program nyata yang bisa diikuti anggota.

Rekomendasi

Berdasarkan pembelajaran di atas, konferensi menyepakati sejumlah rekomendasi untuk memperkuat gerakan ke depan:

1. Penguatan Tata Kelola Sekber: Menetapkan mekanisme pengambilan keputusan yang lebih sederhana dan representatif, dengan memperhatikan peran anggota daerah dan kelompok marginal.
2. Regenerasi dan Kaderisasi: Memperluas keterlibatan anak muda melalui sekolah advokasi, mentoring, dan ruang-ruang kreatif lintas generasi. Kelompok disabilitas perlu dilibatkan sebagai subjek aktif dalam advokasi, bukan sekadar objek penerima manfaat.
3. Bahasa dan Media Publik: Mengembangkan narasi KBB yang lebih mudah dipahami masyarakat, misalnya dengan menekankan konsep kerukunan atau keadilan sosial. Perluasan komunikasi visual, media sosial, dan kegiatan berbasis budaya harus menjadi strategi utama menjangkau publik luas.
4. Aliansi Lintas Isu: Menjalin kolaborasi strategis dengan gerakan lingkungan, gender, masyarakat adat, hak buruh, dan hak sipil untuk memperkuat daya tawar advokasi KBB serta memperluas jangkauan konstituen.
5. Respons Cepat dan Dokumentasi Praktik Baik: Menyusun protokol respons cepat terhadap insiden pelanggaran KBB, sekaligus mendokumentasikan praktik baik dari daerah untuk ditampilkan secara lebih luas sebagai inspirasi.
6. Pengembangan Pokja Tematik: Menjadikan enam kelompok kerja hasil konferensi sebagai tulang punggung advokasi pasca-2025. Pokja tersebut meliputi: (1) kolaborasi lintas iman untuk keadilan lingkungan, (2) penanganan cepat kasus-kasus darurat KBB, (3) solidaritas antar-kelompok minoritas agama dan kepercayaan, (4) peliputan dan dokumentasi dinamika KBB, (5) advokasi aturan dan pembangunan rumah ibadah, serta (6) pendidikan KBB baik formal maupun informal. Sekretariat Bersama bertindak sebagai fasilitator

koordinasi, sementara setiap pokja dijalankan secara mandiri oleh anggota yang memiliki kompetensi dan minat di bidang tersebut.

7. Pendanaan dan Kolaborasi Sumber Daya. Mengembangkan model dukungan berbasis kolaborasi lintas lembaga, sehingga pendanaan tidak hanya bergantung pada uang tunai, melainkan juga dukungan kapasitas dan infrastruktur.

Penutup

Konferensi Refleksi Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) Indonesia 2025 di Tomohon, Sulawesi Utara, menandai langkah penting bagi konsolidasi gerakan KBB di tengah tantangan demokrasi nasional. Selama empat hari, konferensi mempertemukan aktivis masyarakat sipil, akademisi, serta perwakilan komunitas agama dan kepercayaan untuk merefleksikan capaian, mengidentifikasi tantangan, dan menyusun arah kerja ke depan.

Hasil utama konferensi, termasuk “Maklumat Minahasa untuk Demokrasi Kita” dan kesepakatan membentuk enam kelompok kerja tematik, memperlihatkan komitmen Koalisi KBB untuk bergerak secara lebih terstruktur, kolaboratif, dan relevan dengan kebutuhan komunitas. Sekretariat Bersama akan memfasilitasi koordinasi antar-pokja ini sehingga kerja anggota Koalisi dapat lebih terintegrasi, berkesinambungan, dan responsif terhadap dinamika politik maupun kasus-kasus di lapangan.

Konferensi ini juga menegaskan bahwa advokasi KBB tidak hanya berfokus pada isu keagamaan, melainkan terhubung erat dengan keadilan sosial, lingkungan, gender, serta penguatan demokrasi secara menyeluruh. Dengan merangkul interseksionalitas dan memperluas aliansi lintas isu, gerakan KBB mampu memperkuat daya tawarnya di ruang publik sekaligus menjaga relevansinya bagi masyarakat luas.

Dengan demikian, konferensi 2025 bukan hanya forum refleksi, tetapi juga titik berangkat menuju strategi gerakan yang lebih solid. Ke depan, Koalisi KBB diharapkan mampu memperluas jangkauan, membangun solidaritas yang lebih inklusif, dan memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat rumah demokrasi Indonesia.***

Lampiran 1

Daftar Nama Peserta Konferensi Refleksi Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) di Indonesia 2025

Tomohon, Sulawesi Utara, 1-4 September 2025

A. Peserta dari Seluruh Indonesia (Non-Tuan Rumah)

No.	Nama	Lembaga
1	Abiyasa Iqbal Aula	Koalisi Lintas Isu Yogyakarta
3	Alifa Ardyasavitri	PUSAD Paramadina
4	Angelique Maria Cuaca	Komunitas Pemuda Lintas Agama (Pelita) Padang
5	Dicky Sofjan	Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS)
6	Eko Cahyono	Sagoyjo Institute
7	Elga Sarapung	Interfidei
8	Fajar Utami	PUSAD Paramadina
9	Fauziah A Ngabalin	Koalisi Inklusi Ambon
10	Ferry Wira Padang	Aliansi Sumut Bersatu (ASB)
11	Firdaus Mubarik	Jemaat Ahmadiyah Indonesia
12	Halili Hasan	SETARA Institute
13	Hemlyvaarti D. Dannes	Komnas Perempuan
14	Hendra Kusuma W	Aliansi Advokasi KBB Kaltim
15	Heri Pramono	LBH Bandung
16	Hurriyah	Indonesian Scholar Network on Freedom of Religion and Belief (ISFoRB)
17	Husni Mubarak	The Asia Foundation
18	Ida Fitri	Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS)
19	Ihsan Ali-Fauzi	PUSAD Paramadina
20	Ilma Sovri Yanti Ilyas	Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP)
21	Iqbal Ahnaf	Center for Religious & Cross-Cultural Studies (CRCS)
22	Ismail Al-'Alam	PUSAD Paramadina
23	Jimmy Sormin	GPIB Marga Mulya
24	Juandi Gultom	Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI)
25	Kautsar Muharya Muarsi	KaMU DemRes Aceh
26	M. Agung Saputro	PUSAD Paramadina
27	Margie Ririhena-de Wana	Mupel GPIB Jawa Barat 2
28	Marzuki Rais	Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)
29	Mohamad Syafari Firdaus	Solidaritas Korban Pelanggaran (SKP) HAM Sulteng
30	Noorhalis Majid	Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan (LK3) Banjarmasin
31	Nurlaila Sopamena	UIN Ambon
32	Pdt. Johan Kristantara	Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI)
33	Pdt. Sylvana Apituley	ICRP
34	Ribka Ninaris Barus	Center for Religious & Cross-Cultural Studies (CRCS)
35	Rosidin	Yayasan Fahmina
36	Rosnida Sari	Ketua Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Jember
37	Roy Murtado	Pondok Pesantren Al Anwar Bogor
38	Sains Pieter	Desk KBB PGIW Jabar
39	Samsul Maarif	Center for Religious & Cross-Cultural Studies (CRCS)
40	Sawyer Martin French	Suryakanta
41	Silmi Novita Nurman	Komunitas Pemuda Lintas Agama (Pelita) Padang
42	Siti Munawaroh	Jaringan Gusdurian/Yayasan Bani Kyai Haji Abdurrahman Wahid

43	Siti Nurhayati	PUSAD Paramadina
44	Soesiana T. Ekawati Silver	Majelis Rohani Nasional Baha'i Indonesia
45	Suraji	Gusdurian
46	Tedi Kholiludin	Lembaga Studi Sosial dan Agama (ELSA)
47	Tri Gunawan Hadi	LDII
48	Tri Noviana	Yayasan LKiS
49	Triana Komalasari R.	Komnas Perempuan
50	Yogi Febriandi	Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
51	Zainal Abidin Bagir	Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS)
52	Zarniel Woleka	Komunitas Peace Maker Kupang (KOMPAK)/YKPI
53	Zulfan Taufik	Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

B. Peserta dari Sulawesi Utara

No.	Nama	Lembaga
1	Andika Sambouw	Madrasah Intelektual Ahmad Syafii Maarif (MI-ASM)
2	Andre Nehemia	GKIN (Gereja Kristen Injil Nusantara)
3	Cheny Wahani S.pd	Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI)
4	Denni H. R. Pinontoan	Pusat Kajian Kebudayaan Indonesia Timur (PUKKAT)
5	Fikii Olola	DPD IMM Sulawesi Utara
6	Gilang Nugraha	JAI
7	Hafiz Ahmad Mutu	Ahmadiyah Manado
8	Iswan Sual	Lalang Rondor Malesung (LAROMA)
9	Jull Takaliuang	Yayasan Suara Nurani Minaesa
10	Kemerlien Ondang	Wale Mediasi
11	Kharisma Kurama	AMAN SULUT
12	Mun Djenaan	Swapar Sulut
13	Nanang Supratna	JAI
14	Nur Allan Lasido	Rumah Moderasi Beragama IAIN Manado
15	Nurhasanah	Gerakan Perempuan Sulut
16	Nurila Lasene	Gusdurian Manado
17	Nuruddin Ahmad	JAI
18	Patricia Tangkudung	Koalisi Paham
19	Rahman Mantu	Gusdurian Manado
20	Riane Elean	PUKKAT
21	Rikson K	PUKKAT
22	Rohit Mahatir Manese	Makawale KBB 2025
23	Ruth Ketsia	PERUATI
24	Satriyano Pangkey	LBH Manado
25	Siti Nurlaili Djenaan	Yayasan Swara Parangpuan Sulut
26	Suryadi Kawatak	Yayasan Cahaya Mercusuar
27	Tarmidzi Ali	JAI
28	Tohirotun Bahiya	Baha'i
29	Yaakov B	ICRP
30	Yessi Talibo	Gusdurian Manado
31	Zaqwan H. Kadir	PMII Cabang Metro Manado

Lampiran 2

Rundown Konferensi Refleksi Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) di Indonesia 2025

Tomohon, Sulawesi Utara, 1-4 September 2025

Waktu (WITA)	Durasi	Acara/Tema	Lokasi
<i>Hari 1 – Senin, 1 September 2025</i>			
16.00 – 18.00	120 menit	Registrasi dan Check-in Peserta	Panti Semadi
18.00 – 19.00	60 menit	<i>Makan Malam</i>	
19.00 – 21.00	120 menit	Pembukaan dan Presentasi Asesmen Lembaga Anggota	Aula Utama
<i>Hari 2 – Selasa, 2 September 2025</i>			
07.00 – 09.00	60 menit	<i>Sarapan</i>	
09.00 – 10.30	90 menit	Pleno 1: KBB dan Demokrasi dalam Gelombang Otokrasi	Aula Utama
10.30 – 11.00	30 menit	<i>Coffee Break</i>	
11.00 – 12.30	90 menit	Breakout 1: Analisis Masalah Internal Koalisi KBB Catatan: Peserta dibagi menjadi 3 kelompok	- Ruang Aula Utama - Ruang Kelas 1 - Ruang Kelas 2
12.30 – 14.00	90 menit	<i>Ishoma</i>	
14.00 – 15.30	90 menit	Breakout 2: Eksternal Koalisi KBB Catatan: Peserta dibagi menjadi 3 kelompok	- Ruang Aula Utama - Ruang Kelas 1 - Ruang Kelas 2
15.30 – 16.00	30 menit	<i>Coffee Break</i>	
16.00 – 17.00	60 menit	Pleno 2: Analisis Masalah Internal dan Eksternal Koalisi KBB	Aula Utama
19.30 - 21.30	120 menit	Pertemuan dengan Koalisi Advokasi KBB Sulawesi Utara (Makawale)	Aula Utama
<i>Hari 3 – Rabu, 3 September 2025</i>			

07.00 - 09.00	60 menit	<i>Sarapan</i>	
09.00 – 10.30 (90 menit)	90 menit	Pengantar	Aula Utama
		Breakout Panel A: Interseksionalitas KBB Catatan: Peserta dibagi menjadi 4 kelompok isu, yakni: 1. Gender dan Disabilitas 2. Kemiskinan Struktural 3. Hak-Hak Sipil 4. Lingkungan	- Ruang Aula Utama - Ruang Kelas 1 - Ruang Kelas 2 - Ruang Kelas 3
10.30 – 11.00	30 menit	<i>Coffee Break</i>	
11.00 – 12.30	90 menit	Breakout Panel B: Strategi Advokasi KBB Catatan: Peserta dibagi menjadi 4 studi kasus, yakni: 1. Advokasi Hukum 2. Basis Komunitas 3. Kampanye Digital 4. Pendidikan Publik	- Ruang Aula Utama - Ruang Kelas 1 - Ruang Kelas 2 - Ruang Kelas 3
12.30 – 14.00	90 menit	<i>Ishoma</i>	
14.00– 15.30	90 menit	Pleno 3: Berbagi Hasil Diskusi Panel	Aula Utama
15.30 – 16.00	30 menit	<i>Coffee Break</i>	
16.00 – 17.30	90 menit	Penutupan dan Evaluasi Konferensi	Aula Utama
17.30 – 19.00	90 menit	<i>Makan Malam</i>	
19.00 - 22.00	180 menit	Festival Budaya Catatan: Peserta memakai baju adat	Aula Utama
<i>Hari 4 – Kamis, 4 September 2025</i>			
06.00 - 07.00	60 menit	<i>Sarapan</i>	
07.00 - 07.30	30 menit	Peserta Berkumpul dan Masuk Bus	Gerbang Panti Semadi
07.30 - 08.30	60 menit	Perjalanan dari Kota Tomohon ke Reklamasi Pantai Utara Tuminting	-
08.30 - 11.00	150 menit	Ekskursi 1 - Reklamasi Pantai Utara Tuminting - Sambutan Nelayan Manado Utara - Sambutan Koalisi Advokasi Sulawesi Utara - Diskusi Terkait Reklamasi Pantai Manado Utara	Kampung Nelayan Pantai Utara Tuminting

11.00 - 11.30	30 menit	Perjalanan menuju Rumah Misi JAI Manado	-
11.30 - 13.00	90 menit	<i>Tiba di Rumah Misi JAI Manado dan Ishoma</i>	Rumah Misi JAI Manado
13.00 - 15.00	120 menit	Ekskursi 2 - Rumah Misi JAI Manado - Sambutan JAI Manado - Sambutan Koalisi Advokasi Sulawesi Utara - Diskusi Terkait Persekusi terhadap Ahmadiyah & Transformasi Korban	Rumah Misi JAI Manado
15.00 - 15.45	45 menit	Perjalanan menuju Vihara	-
15.45 - 18.00	135 menit	Ekskursi 3 - Vihara Arama Kebun Kesadaran Manado - Sambutan Pimpinan Vihara - Sambutan Koalisi Advokasi Sulawesi Utara - Diskusi terkait Vihara di Indonesia	Vihara Arama Kebun Kesadaran Manado
18.00 - 19.00	60 menit	<i>Makan Malam</i>	Vihara Arama Kebun Kesadaran Manado
19.00 - 20.30	90 menit	Perjalanan Menuju Panti Semadi Tomohon	-
<i>Hari 5 – Jumat, 5 September 2025</i>			
07.00 - selesai		<i>Sarapan dan Peserta Check Out</i>	Panti Semadi

Lampiran 3

MAKLUMAT MINAHASA UNTUK DEMOKRASI KITA

Oleh Koalisi Advokasi KBB Indonesia

Kami, Koalisi Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) Indonesia, yang baru saja menyelenggarakan konferensi tahunan di Tomohon, Bumi Minahasa, Sulawesi Utara, 1-4 September 2025, menyampaikan maklumat sekaligus ketegasan sikap kami mengenai situasi mutakhir demokrasi di Tanah Air tercinta. Berikut 7 butir maklumat kami:

1. Kami menyampaikan solidaritas penuh cinta kepada massa aksi yang secara bergelombang terus menyampaikan kepentingan rakyat, termasuk mereka yang hingga saat ini menjadi korban penculikan dan penahanan oleh aparat, dan terutama kepada mereka yang telah menjadi martir dalam gelombang ini. Sejauh ini, terdapat 10 orang martir yang akan terus kami ingat: Affan Kurniawan (Jakarta), Andika Lutfi Falah (Jakarta), Rheza Sendy Pratama (Jogja), Sumari (Solo), Saiful Akbar (Makassar), Muhammad Akbar Basri (Makassar), Sarina Wati (Makassar), Rusdamdiansyah (Makassar), Iko Juliant Junior (Semarang), dan Septinus Sesa (Manokwari).
2. Kami mengecam Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, yang dalam pernyataan publiknya tidak meminta maaf, dan malah menebarkan ketakutan dan kecurigaan sesama anak bangsa dengan melontarkan isu-isu murahan seperti demonstrasi yang didanai asing dan berorientasi makar, bahkan teror. Kami juga mengecamnya karena menaikkan anggaran untuk alat-alat kekerasan negara (Polisi, BIN) dan memberi penghargaan kepada Ketua DPR di tengah situasi krisis kepercayaan publik terhadap institusi Polri dan DPR.
3. Kami mengecam Kapolri, Listyo Sigit Prabowo, yang tidak mempidanakan aparat pelaku pembunuhan terhadap para martir, dan menciptakan suasana perang terhadap massa aksi dengan mengerahkan aparat bersenjata, menembakkan gas air mata, memukuli massa, dan menangkap mereka. Kami juga mengecam langkah mereka yang mengkriminalisasi para aktivis dan menyerang kampus sehingga mengancam kebebasan berekspresi dan kebebasan akademik.
4. Kami mengecam TNI yang mencari muka dengan mendekati massa aksi di beberapa titik, mencitrakan diri dekat dengan rakyat di tengah UU TNI yang problematik dan mendorong militerisasi ruang publik, tetapi kemudian menampakkan wajah aslinya dengan pengerahan senjata dan kendaraan pertahanan yang menciptakan suasana perang terhadap massa. Kami mengecam pula tindakan mereka yang mengerahkan Pam Swakarsa dan akan menimbulkan kekerasan horizontal di antara masyarakat.
5. Kami mengecam DPR-RI yang tidak merespons tuntutan rakyat untuk reformasi menyeluruh DPR-RI dan hanya menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI serta pemangkasan anggaran tunjangan.
6. Kami menyeru semua unsur gerakan sosial untuk mewujudkan bersama-sama kekuatan politik yang berpihak pada rakyat dan berlangsung secara partisipatoris, bukan sekadar imbauan moral apalagi yang ditunjukkan kepada sumber utama kemerosotan demokrasi kita, yakni penyelenggara negara dan elite politik yang korup dan oligarkis. Mari bersama-sama menjaga ruang publik demokratis, partisipatif, dan egaliter; saling jaga sesama warga yang menghasilkan ruang aman untuk semua.

7. Kami menyeru para pemuka agama atau kepercayaan, serta organisasi-organisasi yang mereka naungi, atas nama keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, untuk berpihak kepada rakyat secara terang-benderang dan berada di barisan mereka, bukan bersikap abu-abu apalagi mendukung kesewenang-wenangan penyelenggara negara dan elite politik.

Demikian Maklumat Minahasa yang menjadi posisi kami, sekaligus pedoman bagi kami dalam menyikapi situasi demokrasi Indonesia ke depan. Maklumat ini adalah salah satu upaya kami untuk menjadikan Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) selalu terhubung dengan isu-isu keadilan dan HAM yang lebih luas, sebagai upaya penguatan demokrasi.

Mari wujudkan demokrasi untuk tegaknya keadilan, kejujuran, dan kebenaran, bukan kekuasaan yang serakah.

Hidup Rakyat! Hidup Korban! Jangan Diam! Lawan!

Koalisi Advokasi KBB Indonesia:

1. Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina
2. Yayasan Fahmina
3. Solidaritas Korban Tindak Pelanggaran KBB (Sobat KBB)
4. Indonesian Scholar Network on Freedom of Religion or Beliefs (ISFoRB)
5. Sekretariat Bersama (Sekber) Koalisi Advokasi KBB
6. Komunitas Peace Maker (Kompak) Kupang
7. Zarniel Woleka (Kupang)
8. Pelita untuk Perdamaian dan Keberagaman (Pelita) Padang
9. Koalisi Lintas Isu Yogyakarta
10. Yayasan Lembaga Studi Sosial dan Agama (ELSA) Semarang
11. Centre for Human Rights, Multiculturalism and Migration (CHRM2), Universitas Jember
12. Jaringan GUSDURian
13. Aliansi Advokasi KBB Kaltim
14. Rosnida Sari (Universitas Jember)
15. Nurlaila Sopamena (UIN A. M. Sangadji Ambon)
16. Madrasah Intelktual Ahmad Syafi'i Maarif (MI ASM)
17. Eko Cahyono (Sajogyo Institute)
18. Yayasan Kompak Damai Indonesia
19. Andreas Harsono (Human Rights Watch)
20. A. Elga J. Sarapung (Institut DIAN/Interfidei)
21. Zulfan Taufik (UIN Sjech M. Djamil Djambek)
22. Swara Parangpuan Sulawesi Utara
23. Pusat Kajian Kebudayaan Indonesia Timur (PUKKAT)
24. Yayasan Suara Nurani Minaesa
25. Roy Murtadho (Pesantren Ekologi Misykat al-Anwar Bogor)
26. Aliansi Sumut Bersatu (ASB)
27. Zaqwan Kadir (PMII Metro Manado)
28. Koalisi Advokasi KBB Sulawesi Utara
29. YLBHI-LBH Manado
30. Lalang Rondor Malesung (LAROMA), Penghayat Kepercayaan Malesung, Minahasa Selatan

31. Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Wilayah Jawa Barat
32. Solidaritas Korban Pelanggaran HAM (SKP-HAM) Sulawesi Tengah
33. Pdt. Jimmy Sormin (GPIB Marga Mulya Yogyakarta)
34. Zainal Abidin Bagir (Universitas Gadjah Mada)
35. Ida Fitri Astuti (Indonesian Consortium for Religious Studies)
36. Noorhalis Majid (Ambin Demokrasi Kalimantan Selatan)
37. Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP)
38. Fikli Olola (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sulawesi Utara)
39. Andika Sambow (Madrasah Intelektual Ahmad Syafii Ma'arif)
40. Yayasan Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS)
41. Koalisi Anak Muda Demokrasi Resilience (KaMuDemRes) Aceh
42. Yogi Febriandi (Gusdurian Aceh)
43. Milenial Inklusi Maluku
44. Andre Lahama GIKIN (Gereja Kristen Injili Nusantara Bitung)
45. Masyarakat Dialog Antar Agama (MADIA)
46. Ribka Barus (CRCS UGM)
47. Sains Pieter (Desk KBB PGIW Jabar/GKP)
48. Hurriyah (Universitas Indonesia)
49. YLBHI-LBH Bandung
50. Halili Hasan (Universitas Negeri Yogyakarta)
51. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia
52. Ismail Al-'Alam (Perkumpulan IndoProgress)
53. Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulawesi Utara
54. Ruth Ketsia (Koalisi Advokasi KBB Sulawesi Utara)
55. Gerakan Perempuan Sulawesi Utara (GPS)
56. SETARA Institute

Narahubung: 088225136038 // Website: kbb.id // E-mail: sekber.kbb@gmail.com

Lampiran 4

Kelompok Kerja KBB 2025-2026

Sekber Koalisi Advokasi KBB Indonesia

Beberapa Catatan:

1. Saran-saran awal mengenai pokja-pokja berikut ini dibuat berdasarkan berbagai sumbang saran dan percakapan yang berlangsung dalam konferensi tahunan di Tomohon, Sulawesi Utara, 1-4 September 2025. Sektor-sektornya masih bisa diperbanyak atau diperluas, tergantung kepada saran anggota koalisi.
2. Kelompok-kelompok kerja (pokja) akan menjadi platform utama di mana kemitraan di antara individu atau lembaga yang bergiat dalam penguatan KBB diperkuat dengan berbagai cara sesuai kreativitas masing-masing. Pokja-pokja akan menjadi andalan kita bergiat bersama, selain Sekber Koalisi KBB yang akan mengkoordinasi semua kegiatan bersama (seperti diskusi bulanan, website, dan konferensi tahunan). Inisiatif mengaktifkan pokja-pokja sebenarnya sudah dimulai tahun lalu, tetapi memperoleh penekanannya lebih jauh dalam konferensi terakhir, karena bertemunya banyak orang atau lembaga dengan pikiran, sumberdaya dan kepentingan yang sama untuk memajukan sektor-sektor KBB yang sama.
3. Pada tahap awal, Sekber Koalisi KBB akan mengaktifasi pokja-pokja ini, termasuk menyarankan koordinator masing-masing pokja. Sesudahnya, dinamika pokja-pokja akan dikelola secara mandiri dan Sekber Koalisi KBB hanya bertindak sebagai fasilitator dan memonitor. Anggota Koalisi bisa memilih untuk aktif dan terlibat di dalam pokja-pokja yang ada, terutama jika hal tersebut relevan atau paralel dengan pekerjaan lembaganya.

No.	Sektor	Mandat & Misi	(Contoh) Kegiatan	(Contoh) Anggota
1.	Kolaborasi untuk keadilan lingkungan	Memperkuat kolaborasi lintas-agama/kepercayaan untuk keadilan lingkungan; penekanan pada peran anak-anak muda di akar rumput; berorientasi pada aksi-aksi konkret, bukan dakwah.	- Riset bersama untuk memperkuat konseptualisasi berbasis studi-studi kasus. - Menerbitkan hasil-hasil riset bersama untuk penguatan wacana di tingkat nasional (dan global). - Menyiapkan kemungkinan kursus-kursus untuk anak-anak muda (paduan online atau offline seperti Sekolah Advokasi KBB).	Sajogyo Institute (koordinator); CRCS-UGM; ICRS; Ecobhinneka; Pesantren Misykat Al-Anwar; PUSAD Paramadina; PPIM UIN Jakarta.
2.	Protokol penanganan kasus-kasus darurat	Memperkuat kesiapan kita untuk bersama-sama membantu para korban ketika terjadi kasus-kasus pelanggaran KBB; dari berbagai segi.	- Mengumpulkan dan mengases berbagai protokol yang sudah ada sejauh ini dan menyarankan penguatannya. - Mengusahakan dukungan lembaga-lembaga negara (seperti LPSK, ORI, Komnas HAM, dll.) kepada para korban pelanggaran KBB. - Membangun solidaritas dan dukungan mereka yang berkepentingan untuk memanfaatkan protokol ini.	ELSA (koordinator); YLBHI; PGI; Jaringan GUSDURian; SETARA Institute.
3.	Kelompok minoritas agama/kepercayaan	Memperkuat silaturahmi dan solidaritas di antara kelompok-kelompok minoritas agama atau kepercayaan.	- Mengadakan pertemuan reguler di antara para elite komunitas. - Mengusahakan rilis bersama terkait berbagai peristiwa penting KBB.	JAI (koordinator), PGI, LDII, Baha'i, IJABI.
4.	Peliputan dinamika KBB	Memperkuat informasi publik mengenai dinamika KBB; mencakup bukan saja kisah-kisah buruk, tetapi perkembangan baik juga.	Menyelenggarakan kursus-kursus penulisan mengenai KBB (materi umum tentang penulisan yang baik, ditambah beberapa materi tentang KBB yang pokok).	Sekber Koalisi KBB (koordinator); HRW; AJI; Setara Institute.

			• Mendorong semua anggota Koalisi KBB untuk lebih rajin menuliskan peristiwa terkait dinamika KBB di wilayahnya masing-masing.	
5.	Rumah ibadat	Memperkuat aturan tentang dan praktik pembangunan rumah ibadat.	• Riset mengenai keterbatasan PBM selama ini dan kemungkinan alternatifnya. • Mengadvokasi para pembuat kebijakan ke arah penguatan aturan. • Riset tentang berbagai kekuatan dan kelemahan FKUB dalam mengelola kasus-kasus terkait pembangunan rumah ibadat sebagai pembelajaran.	Fahmina (koordinator); PGI, PUSAD Paramadina; ELSA; LDII; LK3; KOMPAK.
6.	Pendidikan KBB (formal dan informal)	Memperkuat sistem dan lingkungan pendidikan KBB	• Mensosialisasikan buku “Para Pembuat Perubahan: KBB” (terbitan Koalisi Advokasi KBB) dan mendorong pemanfaatannya.	ISFoRB (koordinator); Jaringan Gusdurian; PUSAD Paramadina; STHI Jentera.

Lampiran 5

**Dokumentasi Foto
Konferensi Refleksi Advokasi
Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) di Indonesia 2025**

Tomohon, Sulawesi Utara, 1-4 September 2025



Gambar 1: Peserta berfoto bersama di setelah pembukaan Konferensi.



Gambar 2: Tarian Penyambutan: Kabelá (Bolmong)



Gambar 3: Sesi pengenalan peserta, difasilitasi Pdt. Jimmy Sormin.



Gambar 4: Suasana diskusi peserta mengenai harapan dan kekhawatiran selama Konferensi.



Gambar 5: Peserta dari UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon, Nurlaila Sopamena, membagikan pengalamannya dalam advokasi KBB di tingkat perguruan tinggi



Gambar 6: Salah satu sesi *breakout* yang di fasilitasi oleh Husni Mubarak dengan topik pembahasan KBB dan Kemiskinan Struktural.



Gambar 7: Dua peserta, Silmi Novita Nurman (Pelita Padang) dan Abiyasa Iqbal Aula (Koalisi Lintas Isu) memaparkan hasil diskusi di sesi *breakout*.



Gambar 8: Festival Budaya



Gambar 9: Kunjungan ke Himpunan Nelayan Tongkol.



Gambar 10: Dukungan Koalisi Advokasi KBB Indonesia terhadap perjuangan nelayan dalam menolak reklamasi Pantai Manado Utara.